



THE ROLE OF BANYUMAS DISTRICT IN THE PROGRAM SUPPORTING THE ONE DATA FORUM

PERAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM FORUM SATU DATA

^{1,2,3} Nuki Lestari Wahyuningtyas¹, Ali Rokhman², Tobirin³

^{1,2,3} Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: nuki.wahyuningtyas@mhs.unsoed.ac.id¹, tobirin@unsoed.ac.id², alirokhman@unsoed.ac.id³

ARTICLE INFO

Correspondent

Nuki Lestari Wahyuningtyas
nuki.wahyuningtyas@mhs.unsoed.ac.id

Key words:

One data forum, public
services, data integration

Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 470 – 480

ABSTRACT

The implementation of the One Data Forum in Banyumas Regency is expected to bring positive changes in the development of public services. With improved data integration and accessibility, the Local Government can enhance the efficiency and effectiveness of public services, thus better serving the community. However, further efforts are still needed in terms of maintaining and developing the system to ensure it provides maximum benefits to all parties involved. The governance of the Dimassatria website is expected to serve as a platform for basic, sectoral, and specialized statistical data originating from data producers. Additionally, efforts are being made to enhance the Statistical Development Index through the improvement of administrative documents that were not organized in the previous year.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nuki Lestari Wahyuningtyas <i>nuki.wahyuningtyas@mhs.unsoed.ac.id</i> Kata kunci: <i>forum satu data, layanan publik, integrasi data</i> Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 470 – 480	Penerapan Forum Satu Data di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan layanan publik. Dengan integrasi dan aksesibilitas data yang ditingkatkan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal pemeliharaan dan pengembangan sistem agar sistem tersebut dapat memberikan manfaat maksimal kepada semua pihak yang terlibat. Tata kelola website Dimassatria diharapkan bisa menjadi wadah data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang berasal dari produsen data. Selain itu, juga diupayakan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui perbaikan dokumen administrasi yang belum tersusun pada tahun sebelumnya. <i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Peran Negara dikatakan baik, salah satunya adalah jika produk pelayanan yang diberikan ke Publik dinilai baik. Akan tetapi, mau diakui atau tidak, dalam penyusunan kebijakan yang dihasilkan masih belum bisa sesuai yang diharapkan baik dari segi kelengkapan data maupun bukti nyata yang memadai. Dengan adanya Data lengkap menjadi krusial digunakan supaya dalam proses perumusan kebijakannya bisa lebih berkualitas dan menimbulkan hasil yang baik bagi masyarakat.

Salah satu pencetus gagasan wacana terkait pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia ini berawal asal adanya keresahan Presiden karena kesulitan mendapatkan data yg benar, seksama dan cepat ketika diharapkan oleh Pemerintah, khususnya dalam hal keguatan penyusunan kebijakan publik yang strategis. berdasarkan konflik tadi diatas, ada 4 (empat) kemungkinan kesulitan dalam mendapatkan isu yaitu pertama, data yang diharapkan memang sah-benar tak tersedia di kementerian I forum serta instansi daerah. ke 2 ada banyaknya versi data dan obyek data yang sama pada beberapa kementerian/lembaga dan instansi daerah, saling bertabrakan dan saling menegaskan satu sama lainnya. Ketiga, data yang disediakan validitas dan kualitasnya masih diragukan terutama dengan kaitan kaidah penyusunannya maupun regularitas pemutakhirannya, sebagai akibatnya agak sulit serta dilematis buat dijadikan bahan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keempat, data yg tersedia tak bisa saling diakses serta dipergunakan antar kementerian/lembaga ataupun antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Manshur, A. (2021). Satu Data, Big Data serta Analitika Data: Urgensi

Pelebagaan, Pembiasaan dan Pembudayaan. Bappenas Working Papers, 4(1), 30-46. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.82>).

Purnaweni dan Subono (2020) mengatakan bahwa kebijakan publik yang ada seharusnya dibuat tidak dengan sembarangan, sebab kebijakan publik harus didasarkan pada data dan informasi yang cukup terkait dengan permasalahan kebijakan, tujuan kebijakan, parameter yang seharusnya dipakai, dan rekomendasi yang diusahakan untuk dibuat sesuai dengan kondisi dan berita yang ada di lapangan. Penyelesaian permasalahan harus dibuat dengan melaksanakan telaah serta analisis yang didasarkan pada : (a) adanya petunjuk/data yg cukup baik secara kualitas maupun kuantitasnya, data yang tersajikan valid, bisa dipercaya; (b) sumber yang memadai (layak dianggap, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan). keberadaan data adalah hal yang krusial sehingga harus semakin sering diupayakan ketersediaannya oleh banyak pihak terutama oleh pemerintah dalam rangka aplikasi open government. (Pengembangan sumber Daya Insan serta Penelitian Surabaya JI Raya, B. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs) One Data Indonesia Implementation: Challenges and Critical Success Factors Maulia Jayantina Islami <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>)

Salah satu cara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk melakukan dukungan terhadap aktivitas open data adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 disebutkan bahwa Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan terkait tata Kelola data Pemerintah yang menghasilkan data yg akurat, terkini, terpadu serta bisa dipertanggungjawabkan. Serta praktis diakses dan dibagikan antar Instansi pusat dan Instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas data serta menggunakan kode referensi dan Data Induk (Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Perpres No 39 Tahun 2019)

Selama ini, mau diakui atau tidak, memang data yang ada di Indonesia belum tersusun secara baik dan benar. Banyaknya Instansi Pemerintah yang masih fokus sibuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tentang kebenaran dan keabsahan dari data yang ditampilkan kevalidannya masih diragukan dan belum dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif sebagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Prinsip Satu Data Indonesia

Secara umum, Satu data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola yang membuat data Pemerintahan yang seksama, modern, terpadu, akuntabel, praktis diakses serta dibagikan antara Instansi pusat dan dan Instansi wilayah. seluruh data yang dikumpulkan harus memenuhi standar yg telah ditetapkan untuk menyatukan beberapa database yang tersebar di Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah didalam satu wadah yaitu lembaga Nasional Satu Data Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam rangka memberikan info yang cepat serta tepat supaya dalam

pengambilan Keputusannya juga sempurna. oleh sebab itu, "big data" menjadi kunci buat meningkatkan efektifitas serta efisiensi kinerja Pemerintah. Selain itu, big data ini pula dapat digunakan buat menggambarkan ekosistem data di Indonesia menjadi penemuan data saat pemerintah mengambil Keputusan (Bhairawa Pulera, P., Parningotan Manik, L., Rianto, Y., Sari, A A., & Sadikin, R. (2020). How Indonesia uses Big Data "Indonesian One Data" for the Future of Policy Making. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 2177-2185) Dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 disebutkan, bahwa dalam satu data indonesia, ada 4 Prinsip yang dipenuhi yaitu:

1. Pemenuhan Standar Data yang digunakan
2. Standard data yang dipergunakan, terdiri dari konsep data, klasifikasi data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, skala ukur data yang mencakup nominal, ordinal, interval, dan rasio, satuan data seperti kilometer, meter, hektar, serta definisi yg kentara serta khusus."
3. Metadata, Didalam metadata, informasi penting yang terdapat dibalik data harus dilaksanakan penyusunan dengan baik, mulai dari konsep, definisi data, metode perhitungan data, manfaat asal data, sumber data, disagregasi data (nasional, provinsi atau kabupaten/kota), maupun frekuensi penyusunan datanya (contohnya 5 tahunan, tahunan atau bulanan)
4. Memenuhi kaedah interoperabilitas

Interoperabilitas merupakan kemampuan aplikasi dan sistem buat keamanan dan mempermudah dalam melakukan pertukaran data tanpa memandang batas geografis, politik, atau organisasi. Dengan berbagi data yang dilakukan dengan terkoordinir pada semua organisasi dan departemen berakibat data yang dihasilkan menjadi sangat penting di banyak sektor khususnya dibidang penelitian, pengembangan dan pengalaman pengguna untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Interoperabilitas mengacu pada standar, protokol, teknologi, dan prosedur yang memungkinkan data bergerak di antara sistem yang beragam menggunakan hegemoni insan yang minimal. Ini sangat memungkinkan banyak sistem untuk melakukan komunikasi satu sama lain serta bisa mengembangkan berita menjadi nyata.

Solusi interoperabilitas mengurangi silo data dan membantu organisasi mencapai komunikasi yg sinkron dengan industri. Ini berarti peningkatan efisiensi serta penawaran layanan berkualitas lebih tinggi.

1. Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk

Kode referensi dan Data Induk merupakan kode yang dipergunakan buat menerangkan kode lembaga (kementerian/lembaga atau OPD di daerah), unit kerja eselon, program, aktivitas, keluaran serta sebagainya

2. Memiliki Meta Data

Di onteks keterbukaan dan keterbagipakaian data, seluruh data yg telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia serta disepakati sebagai data prioritas yg harus ditampilkan di Portal Satu Data Indonesia secara terbuka agar bisa diakses di seluruh instansi pemerintah dan diakses oleh masyarakat. Namun, ada pengecualian untuk data-data yang bersifat rahasia.

Kelembagaan Yang Ada Di Satu Data Indonesia

Kelembagaan yang ada di satu data Indonesia terdiri dari (Kementrian PPN/Bappenas. (2021). *SATU DATA SATU DATA INDONESIA BOOKLET*):

1. Dewan pengara, dibentuk oleh Perpres dan diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas
2. Pembina Data Tingkat Pusat atau Daerah Dibentuk oleh Perpres SDI dan Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas (Tingkat Pusat)
3. Walidata Tingkat Pusat/Daerah Dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah
4. Walidata Pendukung Dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah
5. Produsen Data Tingkat Pusat/Daerah Dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, Peraturan Kepala Daerah
6. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah Dibentuk melalui Perpres SDI Diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas
7. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat/Daerah Dibentuk melalui Permen PPN/Bappenas/Peraturan Kepala Daerah

Peran Serta Propinsi Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Program Satu Data Indonesia

Agar kebutuhan program satu data Indonesia ini bisa terpenuhi dengan cepat dan tepat, peran serta semua pihak menjadi sangat penting, karena jika hanya Pemerintah Pusat saja yang bekerja, pemenuhan kebutuhan data menjadi memakan waktu yang lama. Sehingga, diperlukan dukungan dari Propinsi dan Kabupaten juga sangat diharapkan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Propinsi Jawa Tengah juga menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, dengan Website bappeda.jatengprov.go.id, dan pada tanggal 16 Nopember 2021, Bappeda Provinsi Jawa Tengah kegiatan lembaga Satu Data untuk Penguatan Penyelenggaraan kegiatan Forum Satu Data Indonesia pada Jawa Tengah, yang bertujuan untuk mengkomuikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan terkait penyelenggaraan kegiatan Satu Data Indonesia pada Jawa Tengah secara cepat serta tepat.

Diharapkan, dengan pengumpulan data yang berkualitas, bisa menghasilkan Pembangunan yang berkualitas, dengan tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan dan progresif

Peran Serta Kabupaten Banyumas Dalam Pemenuhan Program Satu Data Indonesia

Untuk mendukung Program Forum Satu Data tersebut, Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dan SK Bupati Banyumas Nomor 487.22/722 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. Tim Satu Data Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah kegiatan sosialisasi terkait regulasi Satu Data kepada Perangkat Daerah, pelatihan data statistik sektoral, dan koordinasi dengan BPS pusat terkait integrasi data.

Di dalam Peraturan Bupati Banyumas tersebut diterangkan bahwa tugas produsen data adalah melakukan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data sesuai dengan standar dan menyampaikannya kepada walidata beserta metadata yang melekat pada data tersebut. Sedangkan Dinkominfo disertai tugas sebagai walidata yang bertugas untuk menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh produsen data, melakukan verifikasi dan validasi data, serta

membuka semua data dan metadata di laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu bermam Portal Dimas Satria.

Portal Dimas Satria diluncurkan pada Bulan Desember 2022 oleh Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein. Portal Dimas Satria ini dapat diakses di laman <https://dimassatria.banyumaskab.go.id/>. Portal Dimas Satria berisi data statistik dasar dari BPS, data statistik sektoral dari OPD dan instansi vertikal, data tematik, data spasial, infografis, dan sebagainya. Portal ini diharapkan menjadi *one stop service* pelayanan kebutuhan data bagi pemerintah daerah, lembaga, dan instansi serta masyarakat Kabupaten Banyumas.

Portal Dimas Satria adalah portal yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang merupakan perwujudan dari implementasi program pusat yaitu Program Satu Data Indonesia (SDI). Portal Dimas Satria diharapkan akan menjadi sumber rujukan data tunggal di Kabupaten Banyumas sehingga tidak ada lagi perbedaan data akibat adanya beda standar antar Perangkat Daerah.

Adapun Maksud dan tujuan dibentuknya Aplikasi Dimas Satria adalah untuk menyediakan sebuah platform yang memungkinkan masyarakat untuk mempermudah mengakses berbagai layanan dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan data mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi proses pengaksesan data, informasi, dan layanan terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, efisien, akurat, terkini dan transparan sehingga pelayanan dalam pemberian dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.

Selain itu, Aplikasi Dimas Satria juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik dengan menyediakan banyak informasi yang relevan dan memberi manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyebaran informasi yang penting dan bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan-layanan yang mereka butuhkan. Kesederhanaan antar muka dan keterbacaan yang tinggi juga menjadi bagian dari tujuan aplikasi ini, sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh berbagai kalangan Masyarakat.

Pelaksanaan Penyusunan Daftar Data pada Kabupaten Banyumas telah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu

1. *Focus Group Discussion* terkait Penyusunan Daftar Data pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2023 untuk mengkonfirmasi usulan Daftar Data yang diusulkan oleh Dinkominfo di 29 Perangkat Daerah.
2. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan Rapat Forum Satu Data pada tanggal 21 November 2023 untuk mendapatkan reviu usulan Daftar Data dari Tim Satu Data Kabupaten Banyumas. Kemudian usulan Daftar Data disepakati dan
3. Ditetapkan dalam Forum Satu Data Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Desember 2023 (*Tim Satu Data Kabupaten Banyumas. (n.d.). Daftar Data Kabupaten Banyumas Tahun 2024*)

Penentuan Data Kabupaten Banyumas dilaksanakan agar pengelolaan data sektoral di Kabupaten Banyumas lebih terarah dan dapat memenuhi data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Daftar Data yang telah disepakati telah dikumpulkan pada tahun 2024. Dalam Daftar Data tersebut memuat Produsen Data, Jadwal Pemutakhiran, Dasar/Rujukan, dan Data Prioritas yang mengacu Daftar Prioritas Pusat. Adapun dalam menentukan Data Prioritas harus memenuhi kriteria yang ada yaitu:

1. Melaksanakan dukungan terkait dengan prioritas pembangunan dan prioritas Bupati di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah
2. Melaksanakan dukungan terkait pencapaian tujuan Pembangunan yang berkelanjutan; dan/atau
3. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan yang mendesak Berdasarkan data yang masuk, ada 713 daftar data menurut 29 Perangkat Daerah 260 daftar data menurut 30 data Instansi Vertikal

Dengan adanya program ini, diharapkan aksesibilitas terhadap layanan publik dan percepatan penyebaran informasi yang relevan bagi Masyarakat. Aplikasi ini diharap bisa menjadi alat yang efektif bagi Masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan data yang diharapkan dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 1. Jumlah Daftar Data Menurut Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat daerah	Daftar Data
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	24
2	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	9
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	13
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	26
5	Dinas ARPUSDA Kabupaten Banyumas	20
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	20
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	59
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	30
9	Dinas LH(Lingkungan Hidup) Kabupaten Banyumas	33
10	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	23
11	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	30
12	DPMPITSP Kabupaten Banyumas	15
13	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	65
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	24
15	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	14
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	15
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	23
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas	40
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi (Disnakerkop) dan UKM	44
20	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	31
21	BKPSDM Kabupaten Banyumas	23
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten	11
23	BKAD Kabupaten Banyumas	25
24	BPBD Kabupaten Banyumas	18
25	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	15
26	Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	23
27	Satpol PP Kabupaten Banyumas	14
28	RSUD Banyumas	13
29	RSUD Ajibarang	13
Total		713

Tabel 2. Jumlah Daftar Data Menurut Instansi Vertikal Tahun 2024

No	Intansi	Daftar Data
1	Polresta Banyumas	8
2	Kodim 0701 Banyumas	2
3	Kejaksaan Negeri Purwokerto	1
4	Kejaksaan Negeri Banyumas	1
5	Pengadilan Negeri Purwokerto	25
6	Pengadilan Negeri Banyumas	25
7	Kementerian Agama Banyumas	17
8	Pengadilan Agama Purwokerto	1
9	Pengadilan Agama Banyumas	1
10	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	1
11	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah	14
12	Badan Pusat Statistik	66
13	ATR/BPN	10
14	Perum Perhutani KPH Banyumas Timur	11
15	Perum Perhutani KPH Banyumas Barat	11
16	UPPD Banyumas BPPD Prov. Jateng	2
17	Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	4
18	PT. PLN (Persero) Area Purwokerto	12
19	PT. KAI (Persero) DAOP 5 Purwokerto	4
20	PT. Pos Indonesia Purwokerto	4
21	PERUMDAM Tirta Satria Banyumas	3
22	PMI Kabupaten Banyumas	3
23	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Banyumas	4
24	KPU	3
25	Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan	3
26	BPJS Kesehatan KC Purwokerto	9
27	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	1
28	Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah	1
29	OJK Purwokerto	3
30	Cabang Dinas ESDM Slamet Selatan	10
Total		260

Tata Cara Penginputan & Pengupdatean Daftar Data Pada Program Dimas Satria

Tata cara dalam penginputan dan pengundatean Daftar data pada Program Dimas Satria yaitu:

1. Melakukan identifikasi sumber daya yang relevan dengan Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal terkait
2. Melakukan penginputan data di aplikasi e-office melalui user name dan password coordinator Perangkat Daerah yang ditunjuk
3. Melakukan verifikasi data, untuk memastikan data yang diinput akurat dan valid
4. Melakukan pengupdatean data apabila ada data yang perlu di update secara berkala
5. Melakukan [endokumentasian data, mencakup detail tentang sumber data, proses pengolahan data, dan hasil verifikasi atau audit data
6. Melakukan pengamanan data, agar data yang diinput dan diupdate dapat terlindungi dengan baik

Kendala dalam Penginputan Dan Pengupdatean Daftar Data Pada Program Dimas Satria

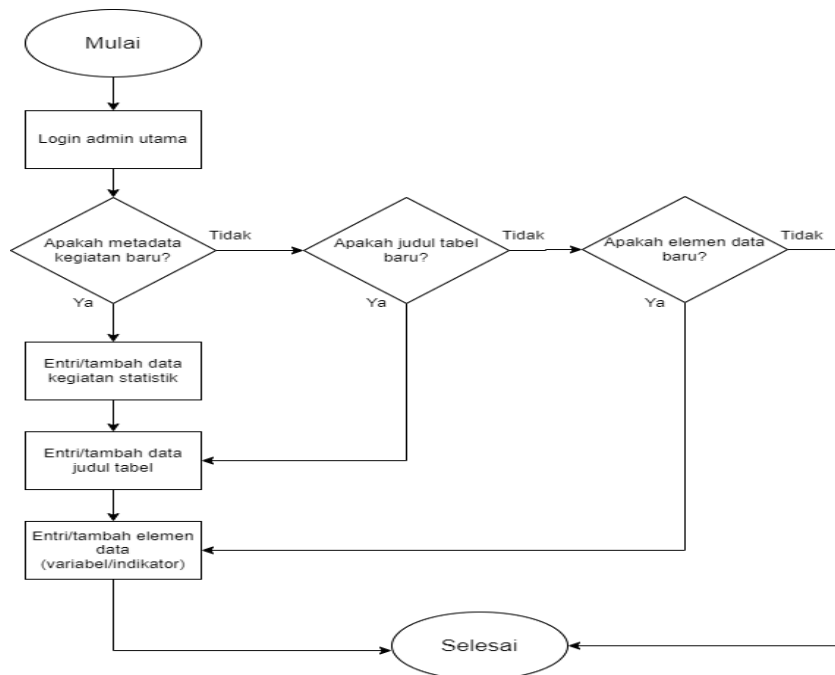
Dalam penginputan Aplikasi Dimas satria, khususnya Dinas Perhubungan sebenarnya tidak ada kendala yang bermakna, hanya saat penginputan, masih

kurangnya pengadministrasi yang menginput, sehingga menunggu petugas lapangan selesai melaksanakan tugasnya. Hal ini menyebabkan pelaporan tidak bisa tepat waktu.

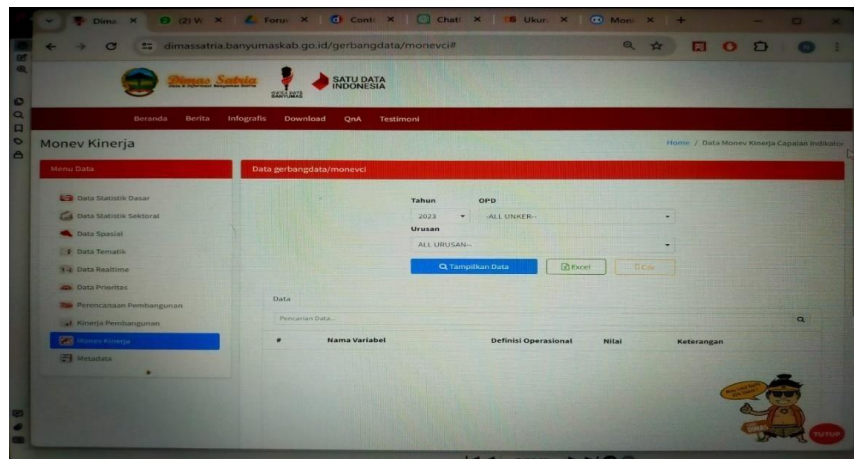
Alur Pengisian Aplikasi Dimas Satria

Didalam Portal Dimas Satria ada dua bagian yaitu *frontend* dan *backend*. Frontend merupakan laman yang dapat diakses secara umum, hidangan di dalam page frontend terdiri dari data statistik dasar, data statistik sektoral, data spasial, serta data kinerja pembangunan. Sedangkan backend merupakan page yang hanya dapat diakses oleh admin Portal Dimas Satria menjadi daerah buat memproses serta menyimpan data (pedoman Entri Metadata Portal Dimas Satria iPANDUAN ENTRI METADATA pada PORTAL DIMAS Satria KABUPATEN BANYUMAS. (n.d.).) sajian di dalam halaman backend berisi input metadata, transaksi data, verifikasi dan validasi, serta laporan progres input data. Adapun komponen di backend Portal Dimas Satria di antaranya:

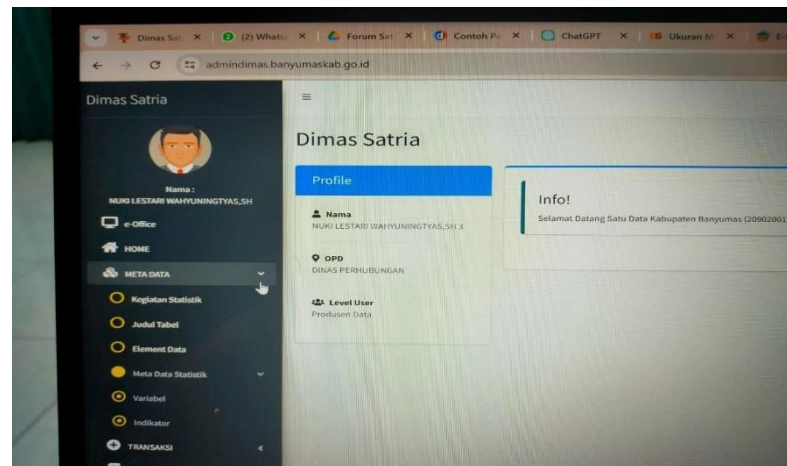
No	Komponen	Fungsi Komponen
1	 HOME	Kembali ke halaman awal
2		Menambah data baru
3	Show 10  entries	Menampilkan baris data
4	PDF Excel Print	Menampilkan, mengunduh, dan mencetak data
5	Search:	Mencari data dengan kata kunci
6		Mengedit data
7	 Keluar	Keluar dari halaman <i>backend</i>
8		Menghapus data



Gambar 1. Alur pikir entri metadata di Portal Dimas Satria



Gambar 2. Halaman yang dapat diakses secara umum. Menu di dalam halaman (Frontend)



Gambar 2. Halaman yang hanya dapat diakses oleh admin Portal Dimas Satria sebagai tempat untuk memproses dan menyimpan data (backend)

Peran Serta Dinas Perhubungan dalam Kegiatan Penginputan Data Dimas Satria Pada Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan saat ini ikut berperan serta aktif dalam penginputan data di Dimas Satria. Dalam hal penginputan data di Dinas Perhubungan, koordinator penginputan adalah Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Perencanaan berkewajiban melakukan koordinasi terkait data dukung apa saja yang harus diinput di aplikasi Dimas Satria dengan para Bidang terkait.

SIMPULAN

Penerapan Forum Satu Data di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan layanan publik. Dengan integrasi dan aksesibilitas data yang ditingkatkan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, serta dapat melayani dengan lebih baik kepada masyarakat. Akan tetapi, masih perlu upaya lebih lanjut dalam hal pemeliharaan dan pengembang sistemnya agar system tersebut bisa memberi manfaat yang maksimal kepada pihak yang terlibat.

Tata kelola website dimas satria diharapkan bisa menjadi wadah data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang berasal dari produsen data. Selain itu juga upaya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui perbaikan dokumen administrasi yang belum tersusun pada tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Perpres No 39 Tahun 2019.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2021). SATU DATA SATU DATA INDONESIA BOOKLET.
- Gubernur Jawa Tengah. (n.d.). Pergub Jateng No 6 Tahun 2022.
- Bupati Banyumas. (n.d.). Perbup Banyumas No 14 Tahun 2021. Bupati Banyumas. Bupati Banyumas. (n.d.). SK Bupati Banyumas 487.22/722/2021.
- Dinkominfo. (2024). Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- Tim Satu Data Kabupaten Banyumas. (n.d.). Daftar Data Kabupaten Banyumas Tahun 2024.
- Fabrianti Kusumasari, T., & Fajar Santoso, A. (2021). *Framework for Measuring Readiness of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation*. www.data.id
- Amelia, R., Sri, A., & Rahayu, Y. (n.d.). *Analysis Of Indonesia's One Data Policy Implementation: The Role Of The Central Statistics Agency As A Statistical Data Coach Analysis Of Satu Data Indonesia Policy Implementation: The Role Of Bps-Statistics Indonesia As A Statistical Data Coach*.
- Suryahadi, M. F. (2022). Satu data Indonesia (*one Indonesian ta*) to actualize public information disclosure and efficacious process management in the Mojokerto city government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 2023. <https://satikomo.mojokertokota.go.id/>.